



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI SULASTUTI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 481369

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.295.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1.655 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 5.702 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 7.099 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 6.170 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 133 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
8. Tanah Seluas 4.860 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 261.000.000

1. MOBIL, AVANZA 1,5 VELOZ MT MINI BUS Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 235.000.000
2. MOTOR, HONDA L1F02N37L1A/T/SOLO Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 828.069.733

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.384.069.733

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.384.069.733

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.